Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagai bagian dari komponen penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, potensi dalam pungutan Pajak Daerah lebih banyak memberikan peluang dan kontribusi bagi suatu Daerah untuk dikoordinasikan secara maksimal apabila dibandingkan dengan berbagai komponen dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena potensi pungutan Pajak Daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik itu ditinjau dari konsep teoritis, kebijakan, maupun dalam implementasinya.

Buku ini berisi konsep dan hasil kajian terkait Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan menambah khasanah Ilmu Pengetahuan serta memberikan informasi mengenai konsep potensi dan pengaruh Pajak Daerah dalam perkembangan suatu Daerah. Dalam buku ini membahas Manajemen Keuangan Daerah, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, serta hasil – hasil kajian terkait dengan Pajak Daerah.

Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Irwan Moridu, SE., MM

Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Irwan Moridu, SE., MM

PENGELOLAAN PAJAK DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

IRWAN MORIDU, SE., MM., CRA

pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

PENGELOLAAN PAJAK DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Penulis:

Irwan Moridu, SE., MM., CRA

ISBN : 978-623-6504-77-2

Cover Design:

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Fajar T. Septiono

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas

Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com

Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2020

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

**Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara
apapun tanpa izin penerbit.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal menjadikan pemerintah daerah harus memiliki kekuatan dan kewenangan yang cukup besar dalam mengelola sumber – sumber kekayaan daerah yang dimilikinya yang digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Pajak daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan penting karena dianggap memiliki kontribusi yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan jenis Pendapatan Asli Daerah yang lainnya.

Buku ini ditulis dalam rangka membantu dan menambah khasanah pengetahuan terkait dengan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung pengelolaan Pajak Daerah yang lebih efektif serta buku ini penulis maksudkan untuk menambah referensi di bidang Manajemen Keuangan khususnya Sektor Publik.

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Penerbit Pena Persada yang telah menerbitkan buku ini. Kepada para kolega pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Luwuk, serta semua pihak yang telah membantu, penulis juga menyampaikan terima kasih. Dan yang tidak terlupa untuk Orang Tua, Keluarga dan Sahabat yang sudah banyak membantu memberikan semangat.

Akhirnya, penulis sangat berterima kasih kepada para pembaca yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan buku ini kedepan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Luwuk, 16 Juli 2020

Irwan Moridu, SE., MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
MANAJEMEN KEUANGAN	9
A. Pengertian Manajemen Keuangan	9
B. Fungsi dan Tujuan Manajemen Keuangan	11
BAB III	
MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH	15
A. Kebijakan keuangan daerah	15
B. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah	17
BAB IV	
PAJAK	20
A. Pengertian Umum Pajak	20
B. Pajak dan Kemajuan Daerah	22
BAB V	
PAJAK DAERAH	24
A. Kecukupan, stabilitas, dan elastisitas	26
B. Keadilan	27
C. Kemampuan Administrasi	29
D. Kesepakatan Politis	30
E. Daya Guna Ekonomi	30
BAB VI	
PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	46

BAB VII	
PENERIMAAN DAERAH & PENDAPATAN ASLI DAERAH	
(PAD)	50
A. Penerimaan Daerah.....	50
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	51
 BAB VII	
HASIL KAJIAN TENTANG PAJAK DAERAH	53
 BAB VIII	
EFEKTIVITAS RATA - RATA PEMUNGUTAN PAJAK	
DAERAH.....	55
 BAB IX	
PENUTUP.....	62
 DAFTAR PUSTAKA	64
PROFIL PENULIS.....	68

PENGELOLAAN PAJAK DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Riduansyah, 2003).

Sumber - sumber penghasilan atau penerimaan negara berasal dari perusahaan - perusahaan negara, barang - barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah, denda - denda, hak - hak waris atau harta peninggalan terlantar, hibah - hibah wasiat atau hibahan lainnya serta pajak, retribusi dan sumbangan. Dari sumber - sumber penerimaan tersebut, penerimaan yang diharapkan memberikan kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak. Peran strategis pajak dan retribusi daerah memang telah memberikan kontribusi signifikan dalam sumber penerimaan PAD. Akan tetapi, perannya belum cukup kuat dalam menyokong APBD secara keseluruhan.

Undang - Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 1 yang berbunyi "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi - bagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota, yang tiap - tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang - undang", ayat 2 yang berbunyi "pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan", ayat 5 yang berbunyi "pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang

oleh undang - undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa daerah Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang bersifat otonom telah melahirkan sebuah desentralisasi kekuasaan yang kemudian melahirkan daerah otonom, baik provinsi, kabupaten atau kota. Ciri penting dari badan atau organisasi yang di desentralisasikan adalah mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai pelaksanaan program.

Pembangunan dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan merupakan suatu proses kemajuan dan perbaikan yang terus menerus menuju tercapainya tujuan yang diinginkan. Secara umum tujuan dari pembangunan yang ingin dicapai adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan adil. Tujuan ini akan tercapai apabila potensi dan sumberdaya yang ada dikelola dan dialokasikan dengan efektif dan efisien.

Pembangunan akan terlaksana apabila ada dana yang tersedia. Dana yang diperlukan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh sumber pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Agar pembangunan terlaksana dengan lancar, tentunya pemerintah daerah harus mampu membiayai seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Semakin besar kebutuhan yang diperlukan maka semakin besar pula dana yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menggali sumber pendapatan daerah lebih baik demi membiayai pembangunan tersebut. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan potensi asli yang dimiliki oleh daerah masing-masing.

UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti atas UU nomor 25 Tahun 1999 “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan

Daerah” menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana di bawah ini:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, sangat diharapkan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya PAD diantaranya yaitu jumlah, jumlah wajib pajak dan tingkat inflasi. Salah satu komponen penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dari sektor pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang - Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing -masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi -potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya.

Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri (Siahaan, M.P, 2010). Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinja man daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.(Suparmoko, 2001:55)

Dengan otonomi daerah akan lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi yang dapat dilakukan. Karena banyak Pemerintah Daerah yang sifatnya otonom, akan banyak pula cara dan sistem administrasi maupun

ekonomi yang berbeda-beda yang diterapkan pada daerah yang berbeda. Akibatnya seperti banyak eksperimen dan tentu ada pula yang gagal. Suatu keberhasilan atau kegagalan merupakan suatu inovasi yang nantinya dapat ditiru oleh daerah-daerah lain yang juga ingin mendapatkan keberhasilan tentunya dengan mengingat kondisi daerah masing-masing. Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki faktor-faktor penunjang diantaranya manusia sebagai pelaksana, maka pelaksanaan kegiatan harus lebih baik, keuangan harus cukup dan baik, peralatannya pun harus cukup dan baik serta organisasi manajemennya harus baik. Dengan melihat hal tersebut, salah satu faktor yang memegang peranan sangat penting adalah faktor keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan pembangunan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan keuangan (dana) yang baik pula.

Keuangan merupakan salah satu syarat kelancaran pelaksanaan pembangunan. Kemampuan keuangan daerah menunjukkan sejauh mana daerah dapat membiayai pembangunan dan pemerintahannya yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Suatu kenyataan bahwa sumber pendapatan tidak semuanya diberikan pada daerah, oleh karena itu maka setiap daerah berkewajiban untuk menggali sumber pendapatannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang “pokok-pokok pemerintahan daerah”, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Pajak Daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah
3. Pendapatan Bagian Laba BUMN dan Investasi lainnya
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Salah satu yang termasuk pendapatan daerah adalah yang antara lain pajak daerah, beberapa diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak air bawah tanah. Pajak hotel dan pajak hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah kota untuk pembiayaan pembangunan. Betapa tidak, Kabupaten Banggai yang merupakan salah satu kota wisata saat ini yang dimana terdapat banyaknya tempat wisata. Dengan adanya fenomena ini seharusnya bisa menjadikan pajak hotel dan pajak hiburan sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banggai. Namun kenyataannya yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak Kabupaten Banggai dari tahun 2009 sampai 2013 bahwa pajak tidak begitu berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
1	2009	5.898.330.337,72	24.299.700.349,00
2	2010	6.383.971.668,90	25.045.047.291,31
3	2011	12.858.650.919,45	35.286.124.662,71
4	2012	13.815.010.636,90	48.127.625.488,84
5	2013	20.398.145.504,76	65.697.805.201,98

(Sumber: DPPKA Kab. Banggai, 2014)

Jika dilihat dari tabel 1 diatas realisasi pajak daerah dari tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan, tetapi jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah masih dikatakan kurang jika dibandingkan dengan potensi pajak yang sebenarnya masih harus diterima oleh Kabupaten Banggai, jika Pemerintah Kabupaten Banggai mampu mengelola pajak daerahnya dengan maksimal dengan potensi Pajak Daerah yang semakin lama semakin meningkat, dikarenakan Kabupaten Banggai dalam tahap perkembangan, sehingganya dari realisasi pajak yang ada seperti pada tabel diatas, setidaknya Pemerintah Kabupaten Banggai masih mampu untuk menggali lebih maksimal lagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajaknya.

Kegiatan pengelolaan keuangan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai tidak terlepas dari peran masyarakat dalam membayar pajak kepada Pemerintah. Hasil dari penerimaan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk pembangunan daerah (memperbaiki sarana dan prasarana pemerintahan seperti perbaikan jalan dan gedung pemerintahan daerah Kabupaten Banggai). Oleh karena itulah, penulis ingin meneliti sejauh mana pajak daerah sebagai salah satu komponen penyumbang pendapatan daerah memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Made Krisna Arta Anggar Kusuma Dan Ni Gusti Putu Wirawati dengan judul penelitian Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD SeKabupaten Kota Di Propinsi Bali dengan hasil penelitian menyatakan bahwa kontribusi pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar 84,9%, sedangkan untuk retribusi daerah hanya sebesar 16,6%.

Himawan Estu Bagijo (2011), Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah (studi kasus di kabupaten/Kota dan pemerintah propinsi di jawa timur), hasil penelitian menunjukkan bahwa disisi Pajak dan Retribusi Daerah sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah (baik

kabupaten/kota maupun propinsi) khususnya sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah dengan aspek kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan urusan wajibnya.

BAB II

MANAJEMEN KEUANGAN

A. Pengertian Manajemen Keuangan

Dalam memperlancar kegiatan operasi perusahaan maka perusahaan tersebut harus di dukung dengan keadaan keuangan yang baik. Menurut Sundjaja dan Barlian (2002 : 34), pengertian keuangan sebagai berikut :“Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah.”

Tugas departemen keuangan dalam suatu perusahaan yang diwakili oleh manajer keuangan tentunya sangat berat karena pencapaian tujuan perusahaan lebih banyak dibebankan kepada manajer keuangan dalam rangka memperoleh serta mengelola dana yang ada. Selain bertugas dalam pengelolaan dana manajer keuangan juga harus mampu berkoordinasi dan bekerja sama dengan departemen lainnya dalam menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dalam mengelola dana yang ada di perusahaan perlunya manajemen keuangan yang baik. Berikut ini adalah pengertian manajemen menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Riyanto (2013:4) pengertian manajemen keuangan adalah sebagai berikut:

“Manajemen Keuangan adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut.”

Menurut Sutrisno (2001:3) berpendapat bahwa pengertian manajemen keuangan adalah sebagai berikut:

“Manajemen Keuangan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya murah serta usaha menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.”

Menurut Sartono (2001:6) manajemen keuangan adalah sebagai berikut:“

Manajemen Keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.”

Menurut Horne (2013:5) yang disadur oleh Kasmir bahwa:“

Manajemen Keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.”Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2001:4) yang di alih bahasakan oleh Robinson Tarigan mengemukakan bahwa:“Manajemen Keuangan dapat diterangkan berdasarkan fungsi dan tanggung jawab dari manajer keuangan. Fungsi utama dari manajer keuangan adalah merencanakan, mencari dan memanfaatkan dana dengan berbagai cara untuk memaksimalkan efisiensi (daya guna) dari operasi-operasi perusahaan.”

Dari definisi menurut para ahli diatas mengenai pengertian manajemen keuangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan adalah aktivitas-aktivitas yang menyangkut perencanaan, pencarian dana, pemanfaatan dana serta pengelolaan dana perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan.

B. Fungsi dan Tujuan Manajemen Keuangan

Prinsip manajemen perusahaan menuntut agar baik dalam memperoleh maupun dalam menggunakan dana harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Dalam pengertian manajemen seperti yang telah dijabarkan diatas terkandung fungsi- fungsi perencanaan, pengarahan dan pengendalian. Berhubungan dengan hal itu dalam pemenuhan kebutuhan dana maka perlu adanya perencanaan dan pengendalian yang baik di dalam perusahaan tersebut. Dari uraian diatas maka pada dasarnya fungsi manajemen keuangan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi penggunaan dana atau pengalokasian dana

Fungsi penggunaan dana tentunya harus dilakukan secara efisien. Maksudnya agar setiap dana yang tertanam dalam aktiva harus dapat digunakan seefisien mungkin untuk dapat menghasilkan tingkat keuntungan investasi yang maksimal. Fungsi ini meliputi perencanaan dan pengendalian penggunaan aktiva baik dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap. Agar tidak terjadi pengangguran dana maka perlu adanya pengalokasian dana yang didasarkan pada perencanaan yang tepat sehingga penggunaan dana dapat dilakukan secara optimal. Efisiensi penggunaan dana ini secara langsung mempengaruhi besar kecilnya tingkat keuntungan yang dihasilkan melalui investasi tersebut.

Dalam hal ini diharapkan manajer keuangan mampu menjalankan fungsi penggunaan dana dengan selalu mencari alternatif - alternatif investasi untuk kemudian di analisa dan dari analisa itu harus diambil keputusan mengenai alternatif investasi mana yang akan dipilih atau digunakan. Dengan kata lain manajer keuangan harus mampu mengambil keputusan investasi (*investment decision*).

2. Fungsi pemenuhan kebutuhan dana atau mendapatkan dana

Dimana fungsi ini juga harus dilakukan secara efisien. Manajer keuangan harus mengusahakan agar perusahaan dapat memperoleh dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan. Selain itu manajer keuangan harus mempertimbangkan dengan cermat sifat dan biaya dari masing-masing sumber dana yang akan dipilih, karena tentunya masing-masing sumber dana mempunyai konsekuensi financial yang berbeda-beda.

Pada prinsipnya pemenuhan dana dalam suatu perusahaan dapat disediakan dari sumber intern perusahaan dan sumber ekstern perusahaan. Pemenuhan dana dari sumber intern perusahaan maksudnya sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, misalnya dana yang berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditahan dalam perusahaan (*retained earnings*). Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber intern sering disebut dengan pendanaan intern (*internal financing*).

Pemenuhan kebutuhan dana dari sumber ekstern perusahaan yaitu sumber dana yang berasal dari tambahan penyertaan modal dari pemilik atau emisi saham baru., penjualan obligasi dan kredit dari bank. Apabila perusahaan memenuhi kebutuhan dananya dari luar maka sering disebut dengan pendanaan ekstern (*external financing*). Apabila perusahaan memenuhi kebutuhan dananya berasal dari pinjaman dikatakan perusahaan itu melakukan pendanaan utang (*debt financing*). Dan apabila berasal atau diperoleh dari emisi atau penerbitan saham baru dikatakan perusahaan itu melakukan pendanaan modal sendiri (*external equity financing* atau *equity financing*).

3. Fungsi pembagian laba

Perusahaan tentunya mengharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari pengorbanannya. Dengan kata lain, diharapkan diperoleh laba, laba yang diperoleh dapat dibagikan kepada pihak pemilik. Biasanya dalam perusahaan terjadi selisih paham diantara pihak pemilik dan manajemen mengenai apakah sebagian keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan diinvestasikan kembali (*reinvestasi*) ataupun ingin sebagian keuntungan dibagikan kepada pemilik perusahaan, maka manajer keuangan dalam hal ini harus dapat menjaga keseimbangan antara kedua keinginan tersebut. Dalam hal ini maka diperlukan kebijakan deviden yang baik dalam perusahaan tersebut.

Untuk dapat mengambil keputusan- keputusan keuangan yang benar, maka manajer keuangan perlu menentukan tujuan atau target yang harus dicapai perusahaan. Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan- tujuan yang diinginkan perusahaan. Secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Memaksimumkan nilai perusahaan akan tidak identik dengan memaksimumkan laba, apabila laba diartikan sebagai laba akuntansi (yang bisa dilihat pada laporan laba rugi perusahaan). Sebaliknya memaksimumkan nilai perusahaan akan identik dengan memaksimumkan laba dalam pengertian ekonomi (*economic profit*). Hal ini disebabkan karena laba ekonomi diartikan sebagai jumlah kekayaan yang bisa dikonsumsi tanpa membuat pemilik kekayaan tersebut menjadi lebih miskin.

Menurut Brigham dan Houston (2001:6) yang di ahli bahasakan oleh Robinson Tarigan mengenai tujuan manajemen keuangan yaitu: